**MUJAHADAH**
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

# Sekuritisasi Migrasi di Inggris melalui Narasi Ancaman Keamanan Periode 2021–2024

**Much. Farhad Abbas Musharrof, Moh. Fathoni Hakim, M.Si.**
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
farhatferseirafion@gmail.com, fathoni_hakim@uinsa.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis bagaimana sekuritisasi migrasi di Inggris pada periode 2021–2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan teori sekuritisasi Mazhab Kopenhagen, penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah Inggris membangun narasi bahwa migrasi non-reguler merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara, identitas nasional, dan stabilitas domestik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi seperti *Stop the Boats* menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan yang semakin restriktif, seperti *Nationality and Borders Act 2022*, *Illegal Migration Act 2023*, dan *Safety of Rwanda Act 2024*. Penelitian ini juga menemukan bahwa pergantian pemerintahan pada Juli 2024 tidak mengakhiri sekuritisasi migrasi, melainkan mengubahnya ke bentuk yang lebih administratif dan teknokratis melalui *Border Security Command*. Temuan ini menunjukkan bahwa sekuritisasi migrasi di Inggris telah berkembang menjadi mekanisme yang terlembaga dalam kebijakan keamanan negara. Selain itu penelitian ini menegaskan bahwa sekuritisasi migrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen politik domestik tetapi juga menjadi legitimasi perluasan kewenangan negara dalam pengawasan perbatasan pengendalian mobilitas penduduk serta administratif.

**Kata Kunci:** sekuritisasi migrasi, Inggris, ancaman keamanan, kebijakan suaka, keamanan perbatasan.

***Abstract***

*This research analyses how the securitisation of migration developed in United Kingdom during the 2021–2024 period. Using a qualitative-descriptive approach and the securitisation theory of the Copenhagen School, this study examines how the British government constructed a narrative portraying irregular migration as a threat to state sovereignty, national identity, and domestic stability. The findings demonstrate that narratives such as Stop the Boats became the foundation for increasingly restrictive policies, including the Nationality and Borders Act 2022, Illegal Migration Act 2023, and Safety of Rwanda Act 2024. The study also finds that the governmental transition in July 2024 did not end the securitisation of migration, but rather transformed it into a more administrative and technocratic form through the Border Security Command. These findings indicate that migration securitisation in the United Kingdom has evolved into an institutionalised mechanism within national security policy. Furthermore, this research highlights that migration securitisation functions not only as an instrument of domestic politics, but also*

*as a means of legitimising the expansion of state authority in border surveillance, population mobility control, and administrative governance.*
***Keywords:*** *migration securitisation, United Kingdom, security threat, asylum policy, border security.*

**PENDAHULUAN**

Fenomena migrasi internasional dalam diskursus kontemporer tidak lagi dipandang sekadar sebagai persoalan administratif kependudukan atau isu kemanusiaan lintas batas, melainkan telah mengalami pergeseran paradigma fundamental menjadi isu keamanan nasional yang eksistensial. Proses ini secara teoretis dipahami melalui kerangka 'sekuritisasi', sebuah proses diskursif di mana aktor-aktor elit politik mengangkat suatu isu dari ranah politik normal menuju agenda keamanan mendesak guna membenarkan penggunaan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*).[1] Dalam logika Mazhab Kopenhagen, sekuritisasi melibatkan penentuan 'objek referen'—seperti identitas nasional atau kedaulatan negara—yang diklaim sedang berada di bawah ancaman mematikan, sehingga memerlukan respon yang melampaui prosedur hukum dan politik standar yang berlaku sehari-hari.[2] Di tingkat regional Eropa, konstruksi politik migrasi sejak dekade 1980-an telah mulai menghubungkan mobilitas manusia dengan destabilisasi integrasi domestik dan ancaman terhadap ketertiban umum, yang kemudian dilembagakan melalui instrumen hukum restriktif seperti Konvensi Dublin dan Perjanjian Schengen.[3]

Dinamika sekuritisasi ini tidak terjadi secara vakum, melainkan berakar pada bagaimana negara-negara Barat membangun narasi tentang 'bahaya' yang dibawa oleh imigran terhadap stabilitas ekonomi dan kohesi sosial mereka. Jef Huysmans berpendapat bahwa pengembangan kebijakan migrasi yang restriktif di Uni Eropa mencerminkan upaya sistematis untuk membingkai pengungsi dan pencari suaka sebagai tantangan terhadap perlindungan identitas nasional dan sistem kesejhateraan (*welfare state*).[4] Melalui proses ini, migrasi dicitrakan sebagai elemen yang secara intrinsik dapat merusak harmoni domestik, sehingga memicu apa yang disebut sebagai politik kepemilikan (*politics of belonging*) yang eksklusif.[5] Dengan demikian, sekuritisasi migrasi bukan sekadar respon teknis terhadap peningkatan arus orang, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang sengaja memposisikan 'liyan' sebagai ancaman terhadap 'Kita', yang kemudian melegitimasi adanha tindakan-tindakan pengecualian di perbatasan.[6]

Dalam konteks domestik Inggris, praktik sekuritisasi migrasi memiliki keunikan tersendiri yang berakar pada manipulasi narasi identitas nasional yang dicitrakan sedang dalam kondisi terancam. Pemerintah Inggris sering kali menggunakan retorika bahwa bangsa Inggris secara alami adalah

[1] Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), 23-24.
[2] Buzan, Wæver, dan de Wilde, *Security*, 25.
[3] Jef Huysmans, "The European Union and the Securitization of Migration," *Journal of Common Market Studies* 38, no. 5 (2000): 751-753.
[4] Huysmans, "The European Union," 755.
[5] Huysmans, "The European Union," 75
[6] Buzan, Wæver, dan de Wilde, *Security*, 119.

masyarakat yang toleran, namun toleransi tersebut diklaim memiliki ambang batas yang hampir terlampaui akibat tekanan migrasi.[7] Narasi 'toleransi yang terancam' ini berfungsi sebagai alat politik yang kuat untuk membenarkan pengetatan perbatasan; seolah-olah demi menyelamatkan nilai-nilai luhur bangsa, negara harus bersikap keras terhadap pendatang.[8] Identitas nasional di sini diposisikan sebagai objek referen yang konservatif dan statis, di mana setiap perubahan demografis atau budaya yang dibawa oleh migran dianggap sebagai gangguan eksistensial terhadap logika "siapa kami" sebagai sebuah bangsa.[9]

Dinamika ini semakin menguat secara signifikan pasca-Brexit, di mana isu kontrol perbatasan menjadi pilar utama kedaulatan nasional Inggris yang baru. Pemisahan diri dari Uni Eropa memberikan momentum bagi elit politik untuk memperkuat dikotomi antara identitas 'Inggris' yang berdaulat dengan 'ancaman' eksternal yang dibawa oleh migran dan pencari suaka.[10] Sekuritisasi identitas ini bekerja melalui diskursus yang secara konsisten menggambarkan migrasi sebagai krisis yang tak terkendali, sehingga menuntut tindakan negara yang lebih tegas dan berdaulat tanpa campur tangan hukum internasional atau regional.[11] Dalam pandangan ini, perlindungan terhadap identitas 'Britishness' menjadi pembenaran moral dan politik bagi kebijakan-kebijakan yang semakin restriktif, menciptakan sebuah lingkungan di mana keamanan nasional selalu dimenangkan atas kewajiban kemanusiaan.[12]

Memasuki periode 2021–2024, strategi sekuritisasi di Inggris berevolusi menjadi lebih teknokratis melalui mekanisme yang disebut sebagai 'pengurangan kompleksitas' (*complexity reduction*). Lucy Mayblin mengungkapkan bahwa para pembuat kebijakan di Kementerian Dalam Negeri Inggris (*Home Office*) cenderung memproduksi kebijakan asilum berdasarkan imajinasi kolektif tertentu yang sering kali menyimpang dari realitas empiris para migran.[13] Dengan mereduksi fenomena migrasi yang kompleks menjadi narasi ancaman keamanan yang sederhana dan linier, pemerintah dapat lebih mudah memobilisasi dukungan publik untuk kebijakan-kebijakan radikal yang sebelumnya sulit diterima secara etis.[14] Pengurangan kompleksitas ini sangat krusial karena ia menghilangkan dimensi kemanusiaan dan latar belakang traumatis para pengungsi, serta menggantinya dengan label-label keamanan seperti "migran ilegal" atau "ancaman perbatasan" yang lebih mudah dikelola secara politik.[15]

---

[7] Ian Paterson dan Georgios Karyotis, "'We are, by nature, a tolerant people': Securitisation and counter-securitisation in UK migration politics," *International Relations* 36, no. 1 (2022): 104-106.
[8] Paterson dan Karyotis, "'We are, by nature, a tolerant people'," 107.
[9] Buzan, Wæver, dan de Wilde, *Security*, 124.
[10] Cristina Saenz Perez, "The Securitization of Asylum: A Review of UK Asylum Laws Post-Brexit," *International Journal of Refugee Law* (2023): 1-2.
[11] Perez, "The Securitization of Asylum," 3.
[12] Paterson dan Karyotis, "'We are, by nature, a tolerant people'," 113.
[13] Lucy Mayblin, "Imagining asylum, governing asylum seekers: Complexity reduction and policy making in the UK Home Office," *Migration Studies* 5, no. 1 (2017): 1-3.
[14] Mayblin, "Imagining asylum," 5.
[15] Mayblin, "Imagining asylum," 12.

Implementasi dari narasi ancaman ini mencapai puncaknya dengan disahkannya *Nationality and Borders Act 2022*, yang secara fundamental mengubah arsitektur hukum asilum Inggris menjadi jauh lebih eksklusif. Undang-undang ini memperkenalkan sistem asilum dua tingkat yang mendiskriminasi pencari suaka berdasarkan cara kedatangan mereka ke Inggris, sebuah langkah yang secara jelas melanggar prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi 1951.[16] Lebih jauh lagi, kebijakan eksternalisasi asilum melalui kesepakatan relokasi dengan Rwanda menunjukkan bahwa Inggris berupaya memindahkan tanggung jawab internasionalnya kepada pihak ketiga di luar wilayah kedaulatannya.[17] Langkah eksternalisasi ini bukan sekadar upaya manajemen perbatasan, melainkan manifestasi nyata dari agenda sekuritisasi yang memandang keberadaan fisik pencari suaka di tanah Inggris sebagai risiko keamanan yang harus segera disingkirkan atau direlokasi.[18]

Pergeseran ini juga menandai transformasi radikal atas konsep 'negara aman' yang kini digunakan sebagai instrumen eksklusi sistematis dalam hukum asilum Inggris periode 2022–2024. Rossella Pulvirenti menyoroti adanya 'ironi perbatasan' di mana Inggris mengubah standar hukum asilum untuk membatasi hak-hak individu guna mencari perlindungan, dengan secara sepihak menetapkan negara-negara tertentu sebagai tempat yang aman untuk relokasi paksa.[19] Melalui perubahan legislatif yang agresif, pemerintah Inggris telah menciptakan mekanisme hukum yang mengecualikan individu dari akses terhadap pengadilan yang adil dan perlindungan hak asasi manusia dasar.[20] Penggunaan label 'aman' terhadap negara ketiga sering kali dilakukan tanpa tinjauan hak asasi manusia yang memadai, membuktikan bahwa prioritas utama negara adalah efektivitas pengusiran dibandingkan dengan kepatuhan terhadap standar hukum internasional yang telah lama diakui.[21]

Secara paralel, kriminalisasi terhadap migran dan mereka yang memfasilitasi kedatangan pencari suaka menjadi instrumen utama dalam memperkuat narasi ancaman keamanan di ruang publik. Dengan membingkai migrasi melalui lensa hukum pidana, negara berhasil mengubah persepsi publik dari pengungsi sebagai korban konflik menjadi aktor ilegal yang melanggar kedaulatan negara.[22] Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk menjerakan (*deterrence*) calon migran, tetapi juga untuk memberikan pembenaran bagi negara dalam mengalokasikan sumber daya keamanan yang besar di Selat Inggris.[23] Dampaknya, pencari suaka sering kali mengalami viktimisasi ganda; mereka melarikan diri dari penganiayaan di negara asal, namun justru menghadapi stigma kriminal dan penahanan

[16] Perez, "The Securitization of Asylum," 4.
[17] Rossella Pulvirenti, "From Solidarity to Exclusion: The 'Safe Country' Concept in UK Asylum Law and the Irony of Borders," *Laws* 14, no. 63 (2025): 1-2.
[18] Perez, "The Securitization of Asylum," 6.
[19] Perez, "The Securitization of Asylum," 6.
[20] Pulvirenti, "From Solidarity to Exclusion," 5.
[21] Pulvirenti, "From Solidarity to Exclusion," 8.
[22] Perez, "The Securitization of Asylum," 17.
[23] Mayblin, "Imagining asylum," 15.

sewenang-wenang setibanya mereka di wilayah yang seharusnya memberikan perlindungan.[24]

Sentimen intoleransi yang dibungkus dengan retorika "menjaga sistem suaka agar tetap adil" menjadi ciri khas dari diskursus pemerintah Inggris selama periode 2021–2024. Klaim bahwa sistem sedang "disalahgunakan" oleh para migran ekonomi yang berpura-pura menjadi pengungsi digunakan untuk melegitimasi penghancuran hak-hak asilum secara sistematis.[25] Ironisnya, retorika ini sering kali bersumber dari manipulasi terhadap nilai toleransi itu sendiri, di mana ketegasan perbatasan dicitrakan sebagai cara untuk melindungi kebaikan masyarakat Inggris dari eksploitasi oleh pihak asing.[26] Fenomena ini menunjukkan betapa dalamnya sekuritisasi migrasi telah merasuk ke dalam birokrasi dan budaya politik Inggris, sehingga perdebatan mengenai migrasi hampir selalu berakhir pada konklusi tentang perlunya tindakan keamanan yang lebih represif dan luas.[27]

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana konstruksi narasi ancaman keamanan secara sistemis digunakan untuk melegitimasi praktik sekuritisasi migrasi di Inggris selama periode 2021–2024. Dengan membedah perkembangan kebijakan seperti *Nationality and Borders Act 2022* dan skema Rwanda, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana manipulasi diskursif terhadap identitas nasional dan ketakutan kolektif telah berhasil mengubah norma hukum internasional menjadi instrumen eksklusi nasional.[28] Pentingnya penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengungkap dampak jangka panjang dari politik sekuritisasi terhadap integritas sistem perlindungan pengungsi global dan bagaimana Inggris memposisikan dirinya di tengah tantangan kemanusiaan internasional.[29] Dengan memahami mekanisme ini, diharapkan dapat terlihat pola bagaimana negara demokrasi liberal dapat menggunakan kerangka keamanan untuk mengesampingkan komitmen asasi kemanusiaan demi ambisi politik domestik.[30]

## Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Sekuritisasi (*Securitization Analysis*) dari Mazhab Kopenhagen.[31] Pendekatan ini dipilih untuk membedah mekanisme di mana isu migrasi non-reguler di Inggris diangkat dari persoalan politik biasa menjadi ancaman keamanan eksistensial yang memerlukan tindakan luar biasa.

### 2. Batasan Penelitian

[24] Perez, "The Securitization of Asylum," 18.
[25] Mayblin, "Imagining asylum," 10.
[26] Paterson dan Karyotis, "'We are, by nature, a tolerant people'," 121.
[27] Buzan, Wæver, dan de Wilde, *Security*, 26.
[28] Pulvirenti, "From Solidarity to Exclusion," 10.
[29] Perez, "The Securitization of Asylum," 18.
[30] Paterson dan Karyotis, "'We are, by nature, a tolerant people'," 122.
[31] Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), 23-25.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kebijakan pemerintah Inggris terhadap migrasi non-reguler (khususnya penyeberangan perahu kecil) dalam kurun waktu 2021 hingga 2024.[32] Batasan ini mencakup fase formulasi kebijakan pasca-Brexit, implementasi skema Rwanda, hingga normalisasi krisis melalui pembentukan *Border Security Command* pada Juli 2024.

**3. Unit dan Level Analisis**

- Unit Analisis : Kebijakan dan narasi keamanan pemerintah Inggris yang tertuang dalam dokumen hukum dan pernyataan resmi elit politik.
- Unit Eksplanasi : Dinamika politik domestik Inggris dan persepsi publik terhadap kedaulatan perbatasan.
- Level Analisis : Negara-Bangsa (*Nation-State*), di mana fokus pengamatan berada pada kebijakan internal Inggris dalam merespons fenomena migrasi lintas batas.

**4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini mengunakan data sekunder melalui studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari sumber-sumber yang relevan, meliputi:

- Sumber Primer: Teks yang memuat catatan undang-undang (*Nationality and Borders Act 2022*, *Illegal Migration Act 2023*, *Safety of Rwanda Act 2024*) dan catatan resmi parlemen Inggris.
- Sumber Sekunder : Jurnal ilmiah internasional dan literatur teoretis yang membedah krisis migrasi di Inggris.

**5. Teknik Analisis data**

Data dianalisis menggunakan metode kualitatif-interpretatif melalui tahapan utama dalam kerangka teori sekuritisasi. Dimulai dengan mengidentifikasi tindakan tutur (*speech act*), hingga tahap akhir analisis yang difokuskan pada identifikasi tindakan luar biasa (*exceptional measures*) dalam kebijakan migrasi Inggris periode 2021–2024 yang menandai adanya penangguhan prosedur politik normal demi kepentingan keamanan nasional.

**Landasan Teori**

Penelitian ini menggunakan Teori Sekuritisasi yang dikembangkan oleh Mazhab Kopenhagen sebagai metode analisis utama. Dalam perspektif konstruktivis ini, keamanan tidak dipandang sebagai sebuah realitas objektif yang statis, tetaoi sebagai hasil dari konstruksi diskursus yang dinamis.[33] Proses sekuritisasi bermula ketika seorang aktor keamanan—biasanya elit politik atau pemerintah—melakukan tindakan tutur (*speech act*) untuk membingkai suatu isu non-politik atau politik normal menjadi sebuah ancaman eksistensial (*existential threat*) terhadap objek referen (*referent*

[32] Cristina Saenz Perez, "The Securitization of Asylum: A Review of UK Asylum Laws Post-Brexit," *International Journal of Refugee Law* (2023): 2.

[33] Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), 21.

*object*) yang berharga, seperti kedaulatan negara atau identitas nasional.[34] Melalui pelabelan "keamanan" ini, aktor tersebut berusaha memindahkan isu terkait keluar dari koridor politik biasa menuju ranah politik darurat yang membutuhkan penanganan segera.[35]

Namun, sebuah isu tidak serta-merta dianggap ter-sekuritisasi hanya karena aktor negara telah meneriakkan adanya ancaman. Mazhab Kopenhagen menekankan bahwa keberhasilan proses ini sangat bergantung pada penerimaan audiens (*audience acceptance*), seperti parlemen, oposisi, atau publik luas, akan adanhya klaim darurat yang ditawarkan oleh aktor tersebut.[36] Ketika audiens menerima bahwa ancaman tersebut nyata dan eksistensial, maka aktor sekuritisasi mendapatkan legitimasi politik untuk melangkah ke tahap akhir, yaitu penerapan tindakan luar biasa (*exceptional measures*).[37] Tindakan luar biasa ini dicirikan oleh adanya penangguhan prosedur hukum normal, pelanggaran atas aturan yang berlaku, atau pembuatan kebijakan restriktif yang dalam kondisi damai tidak akan pernah bisa diterima secara politik.[38]

Dalam konteks studi migrasi, teori sekuritisasi ini sangat relevan untuk membedah bagaimana perpindahan manusia lintas batas tidak lagi dikelola sebagai isu administratif-kemanusiaan, melainkan sebagai ancaman terhadap pertahanan nasional.[39] Ketika sekuritisasi migrasi telah mencapai tahap institusionalisasi, *exceptional measures* yang diambil oleh negara tidak lagi bersifat sementara, melainkan menjelma menjadi arsitektur hukum baru yang mengakar di dalam birokrasi.[40] Melalui kerangka teoretis ini, kebijakan penangguhan hukum asilum, pengusiran otomatis, hingga pembuatan fasilitas penahanan fisik yang koersif dapat dipahami bukan sebagai anomali kebijakan semata, melainkan sebagai perwujudan konkret dari keberhasilan logika darurat yang telah terinstitusi atas nama kedaulatan negara.[41]

**Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme sekuritisasi migrasi yang diimplementasikan oleh pemerintah Inggris dalam rentang waktu 2021 hingga 2024. Melalui identifikasi terhadap berbagai diskursus elit dan pernyataan resmi pemerintah, penelitian ini berupaya memetakan bagaimana narasi "ancaman

[34] Jef Huysmans, "The European Union and the Securitization of Migration," *Journal of Common Market Studies* 38, no. 5 (2000): 753.
[35] Ian Paterson dan Georgios Karyotis, "'We are, by nature, a tolerant people': Securitisation and counter-securitisation in UK migration politics," *International Relations* 36, no. 1 (2022): 101.
[36] Buzan, Wæver, dan de Wilde, *Security*, 25.
[37] Donatella Bonansinga and Charlotte Forrest, "'Stop the Boats': Populist Contagion and Migration Policymaking in the UK," *Ethnic and Racial Studies* (Februari 2025): 31.
[38] Cristina Saenz Perez, "The Securitization of Asylum: A Review of UK Asylum Laws Post-Brexit," *International Journal of Refugee Law* (2023): 3.
[39] Huysmans, "The European Union," 756.
[40] Samson Maekele Tsegay, "A Scoping Review of UK Immigration and Asylum Laws: The Endless Cycle of 'Migration Fix'," *Genealogy* 10, no. 12 (2026): 22.
[41] Rossella Pulvirenti, "From Solidarity to Exclusion: The 'Safe Country' Concept in UK Asylum Law and the Irony of Borders," *Laws* 14, no. 63 (2025): 5.

keamanan" dikonstruksi sedemikian rupa untuk mengubah persepsi publik terhadap pengungsi dan pencari suaka. Dengan memahami pola komunikasi politik ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap bagaimana isu kemanusiaan yang kompleks disederhanakan menjadi persoalan kedaulatan perbatasan yang mendesak, sehingga menciptakan urgensi politik bagi lahirnya kebijakan-kebijakan yang bersifat luar biasa.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari narasi ancaman tersebut terhadap transformasi hukum asilum di Inggris, khususnya pasca berlakunya *Nationality and Borders Act 2022*. Penelitian akan menelaah sejauh mana legitimasi keamanan yang dibangun secara diskursif mampu membenarkan praktik eksternalisasi asilum, seperti skema relokasi ke Rwanda yang kontroversial. Fokus dalam bagian ini adalah untuk melihat adanya sinkronisasi antara retorika politik dengan manifestasi hukum yang secara sistematis membatasi hak-hak dasar migran, serta bagaimana instrumen hukum tersebut berfungsi sebagai alat pengecualian yang efektif dalam kerangka keamanan nasional.

Selain aspek kebijakan, penelitian ini juga diarahkan untuk membedah penggunaan identitas nasional "Britishness" sebagai objek referen dalam proses sekuritisasi. Tujuan di sini adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai seperti toleransi dan kedaulatan dimanipulasi untuk menciptakan dikotomi antara masyarakat domestik yang "terancam" dengan migran sebagai "ancaman". Dengan menganalisis hubungan antara identitas dan sekuritisasi, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa kebijakan keamanan perbatasan Inggris bukan sekadar respon teknis terhadap arus migrasi, melainkan sebuah upaya untuk merekonstruksi kembali batas-batas identitas nasional Inggris di era pasca-Brexit yang lebih eksklusif.

Terakhir, penelitian ini bermaksud untuk memberikan kontribusi teoretis mengenai dinamika sekuritisasi di negara demokrasi liberal dalam menghadapi krisis kemanusiaan global. Dengan mengambil studi kasus Inggris pada periode 2021–2024, penelitian ini ingin menguji apakah praktik sekuritisasi yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum internasional atau justru menandai pergeseran permanen di mana kedaulatan nasional secara konsisten diletakkan di atas kewajiban asasi manusia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memahami risiko jangka panjang dari normalisasi narasi ancaman terhadap migran, yang pada akhirnya dapat mengikis integritas sistem perlindungan pengungsi internasional secara kolektif.

**Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini memfokuskan analisisnya pada diskursus keamanan dan praktik kebijakan migrasi di Inggris dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Batasan waktu ini dipilih karena pada periode tersebut terjadi pergeseran legislatif yang sangat agresif, mulai dari pengesahan *Nationality and Borders Act 2022* hingga dinamika hukum terkait skema deportasi ke Rwanda. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana aktor-aktor utama di pemerintahan menggunakan narasi ancaman terhadap identitas nasional dan kedaulatan perbatasan sebagai alat untuk mengesahkan langkah-langkah luar biasa

yang membatasi hak-hak bagi pencari suaka. Dengan membatasi pada kebijakan internal Inggris, penelitian ini bertujuan untuk membedah fenomena sekuritisasi yang terjadi di dalam salah satu negara penganut demokrasi liberal paling berpengaruh di dunia tersebut.

Untuk menjaga ketajaman metodologis, penelitian ini menetapkan kebijakan sekuritisasi migrasi Pemerintah Inggris sebagai unit analisis utama. Segala bentuk produk hukum, peraturan administratif, hingga program kerja spesifik seperti *Rwanda Scheme* akan dibedah untuk melihat bagaimana negara merespons arus migrasi melalui lensa keamanan. Sementara itu, yang menjadi unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah konstruksi narasi ancaman dan manipulasi identitas nasional yang diproduksi oleh elit politik. Melalui unit eksplanasi ini, penelitian akan menjelaskan faktor-faktor diskursif yang mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan restriktif tersebut, sehingga hubungan antara retorika politik dan tindakan nyata negara dapat terlihat dengan jelas.

Seluruh fenomena ini akan dibedah dalam tingkat analisis negara (*state level*), yang menitikberatkan pada dinamika domestik, kebijakan hukum, dan perdebatan politik di internal Inggris. Pemilihan tingkat analisis ini didasari oleh argumen bahwa meskipun migrasi adalah isu global, otoritas untuk melakukan sekuritisasi dan mengubah status hukum seseorang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan negara. Dengan memfokuskan pengamatan pada interaksi antara pemerintah, parlemen, dan birokrasi di Inggris, penelitian ini dapat memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana sebuah negara berdaulat menegosiasikan kewajiban internasionalnya di tengah tekanan politik domestik pasca-Brexit yang semakin menguat ke arah eksklusi.

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana narasi ancaman keamanan dikonstruksi secara diskursif oleh pemerintah Inggris untuk melegitimasi kebijakan sekuritisasi migrasi pada periode 2021–2024?

**Literatur Terdahulu**

Bagian ini memetakan berbagai pemikiran ahli mengenai bagaimana isu migrasi diubah menjadi isu keamanan, khususnya di Inggris dan Uni Eropa. Bagian ini akan membahas bagaimana kebijakan suaka tidak lagi dipandang sebagai masalah kemanusiaan, melainkan sebagai ancaman terhadap negara. Melalui tinjauan ini, akan terlihat bagaimana literatur terdahulu mendasari analisis mengenai kebijakan Inggris saat ini.

**1. Evolusi Teori Sekuritisasi dan Konstruksi Ancaman Migrasi**

Secara teoretis, ide tentang "sekuritisasi" dipopulerkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dalam buku mereka yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis* (1998). Mereka menjelaskan bahwa sebuah isu—seperti migrasi—bisa berubah menjadi masalah keamanan bukan karena ia benar-benar berbahaya, melainkan karena pemerintah "mengatakan" bahwa itu berbahaya. Proses ini disebut sebagai tindakan

tutur (*speech act*), di mana elit politik meyakinkan masyarakat bahwa ada ancaman yang sangat mendesak sehingga negara boleh melakukan langkah-langkah luar biasa.[42]

Dalam literatur klasik ini, migrasi sering dicitrakan dapat merusak ekonomi atau identitas budaya asli suatu negara. Buzan dan kawan-kawan menekankan bahwa ketika pemerintah berhasil melabeli migran sebagai ancaman, mereka bisa dengan mudah memperketat perbatasan tanpa banyak dikritik.[43] Hal inilah yang akhrinya menggantikan cara khalayak kita dari yang semulanya melihat immigran sebagai manusia yang butuh pertolongan, menjadi objek yang harus diawasi dengan ketat demi menjaga stabilitas nasional.

Menyambung hal itu, Valeria Bello dalam tulisannya yang berjudul *The Spiralling of the Securitisation of Migration in the EU* (2020) menjelaskan bahwa proses ini tidak berhenti di satu titik saja, melainkan terus berputar seperti spiral. Setiap kali ada kebijakan baru yang keras, hal itu justru memperkuat ketakutan masyarakat bahwa keadaan memang sedang "gawat".[44] Bello berargumen bahwa narasi keamanan ini akhirnya menjadi alasan bagi negara untuk terus memperketat aturan dari waktu ke waktu tanpa henti.[45]

Kemudian, Jef Huysmans dalam artikelnya *The European Union and the Securitization of Migration* (2000) juga memperkuat argumen ini dengan melihat kasus di Eropa. Ia mencatat bahwa migrasi sering kali sengaja dihubungkan dengan isu kriminalitas atau terorisme.[46] Dengan mengaitkan migrasi ke hal-hal negatif tersebut, pemerintah secara otomatis menciptakan jarak antara warga negara asli dengan para pendatang, sehingga kebijakan yang membatasi hak para migran dianggap sebagai sesuatu yang wajar.[47] Ketakutan yang terus dinormalisasi inilah yang kemudian membuat isu migrasi dipandang semata sebagai ancaman. Akibatnya, perlindungan hak asasi manusia perlahan tergeser oleh kebijakan negara yang semakin tertutup dan diskriminatif (bahkan untuk negara yang liberal sekalipun).

**2. Identitas Nasional dan Manipulasi Narasi Toleransi di Inggris**

Di Inggris sendiri, cara pemerintah melakukan sekuritisasi sangat unik, yaitu dengan menggunakan narasi identitas. Ian Paterson dan Georgios Karyotis dalam penelitian mereka yang berjudul *'We are, by nature, a tolerant people'* (2022) menunjukkan bahwa politisi Inggris sering berkata, "Bangsa kita adalah bangsa yang toleran."[48] Namun, kata "toleran" ini digunakan secara licik untuk menyatakan bahwa toleransi tersebut ada batasnya, dan para migran dianggap pada tahap yag melampaui batas tersebut.[49] Strategi ini sangat efektif karena pemerintah seolah-olah tidak membenci migran,

[42] Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), 23-25.
[43] Buzan, Wæver, dan de Wilde, *Security*, 121.
[44] Valeria Bello, "The Spiralling of the Securitisation of Migration in the EU," *Journal of Ethnic and Migration Studies* (2020): 1-3.
[45] Bello, "The Spiralling of the Securitisation," 5.
[46] Jef Huysmans, "The European Union and the Securitization of Migration," *Journal of Common Market Studies* 38, no. 5 (2000): 756.
[47] Huysmans, "The European Union," 760.
[48] Ian Paterson dan Georgios Karyotis, "'We are, by nature, a tolerant people': Securitisation and counter-securitisation in UK migration politics," *International Relations* 36, no. 1 (2022): 104-106.
[49] Paterson dan Karyotis, "'We are, by nature, a tolerant people'," 109.

melainkan hanya ingin "melindungi" nilai-nilai luhur Inggris dari tekanan pihak luar. Paterson dan Karyotis berargumen bahwa identitas nasional dijadikan alat politik untuk membenarkan tindakan pengusiran atau penolakan.[50] Dengan kata lain, menjadi "Inggris" berarti harus setuju bahwa perbatasan perlu dijaga sangat ketat agar kenyamanan dan budaya warga asli tidak terganggu.[51]

Narasi identitas ini juga menciptakan pembagian kelompok yang tajam di mata publik. Para pencari suaka sering dituduh membebani layanan publik seperti kesehatan dan bantuan sosial, yang sebenarnya sedang mengalami masalah internal.[52] Literatur menunjukkan bahwa pemerintah sering membenturkan hak migran dengan kebutuhan warga lokal agar mendapatkan dukungan politik.[53] Akibatnya, muncul sentimen nasionalisme yang defensif, yang kemudian memberi "lampu hijau" bagi pemerintah untuk memperkeras kebijakan perbatasan mereka, sehingga kebijakan migrasi seakan malahan diarahkan pada pengawasan, pembatasan, dan penolakan terhadap para pendatang

Terakhir, retorika tentang "invasi" sering digunakan oleh media dan politisi untuk memicu kecemasan kolektif masyarakat. Identitas nasional Inggris pasca-Brexit cenderung dicitrakan lebih tertutup terhadap pengaruh luar.[54] Hal ini membuktikan bahwa identitas nasional bukan sekadar kebanggaan, tetapi telah dimanfaatkan oeleh beberapa fraksi sebagai senjata politik untuk menentukan siapa saja yang boleh masuk ke wilayah Inggris dan siapa yang harus disingkirkan demi keamanan bersama.

**3. Mekanisme Birokrasi dan Penyederhanaan Masalah Suaka**

Selain melalui retorika politik, proses sekuritisasi juga berlangsung dalam praktik dan kebijakan adminstratif di lembaga-lembaga pemerintahan Inggris. Lucy Mayblin dalam karyanya *Imagining asylum, governing asylum seeker*s (2017) menjelaskan bahwa para pembuat kebijakan di *Home Office* Inggris sering kali bekerja berdasarkan "imajinasi" mereka sendiri tentang pengungsi.[55] Mereka cenderung menyederhanakan masalah yang rumit; ketimbang harus memandang para pengungsi sebagai manusia yang lari dari perang, birokrasi lebih suka melabeli mereka secara simpel sebagai "migran ilegal" agar lebih mudah diproses.[56] *Overgeneralising* atau simplifikasi sepihak inilah yang kemudian memperkuat proses sekuritisasi migrasi, karena para pencari suaka diperlakukan sebagai kategori risiko yang seragam, alih-alih sebagai manusia dengan kebutuhan dan latar belakang yang bermacam-macam.

Penyederhanaan ini bertujuan agar pemerintah bisa mengambil tindakan tegas dengan lebih cepat tanpa hambatan moral. Mayblin menyebutkan bahwa dengan menghilangkan sisi kemanusiaan dari para

[50] Paterson dan Karyotis, "'We are, by nature, a tolerant people'," 115.
[51] Huysmans, "The European Union," 758.
[52] Paterson dan Karyotis, "'We are, by nature, a tolerant people'," 117.
[53] Huysmans, "The European Union," 762.
[54] Buzan, Wæver, dan de Wilde, *Security*, 126.
[55] Lucy Mayblin, "Imagining asylum, governing asylum seekers: Complexity reduction and policy making in the UK Home Office," *Migration Studies* 5, no. 1 (2017): 1-3.
[56] Mayblin, "Imagining asylum," 7.

pengungsi, negara bisa menciptakan lingkungan yang "tidak bersahabat" (*hostile environment*).[57] Dalam sistem birokrasi ini, prosedur administrasi sengaja dibuat sangat sulit dan kaku agar para migran merasa tertekan dan akhirnya memilih untuk tidak datang lagi ke Inggris.[58]

**4. Analisis Debat Parlemen dan Perubahan Hukum ke Arah Pengusiran**

Literatur terbaru yang menggunakan analisis data besar oleh Vahid Ghafouri (dkk.) yang berjudul *Framing Migration* pada 2025 menunjukkan bahwa selama puluhan tahun, isi pembicaraan di Parlemen Inggris memang makin lama makin negatif.[59] Kata-kata seperti "kontrol perbatasan" kini jauh lebih sering muncul dibandingkan kata “integrasi”.[60] Hal ini membuktikan bahwa cara pandang seluruh partai politik di Inggris memang sudah bergeser sepenuhnya ke arah memandang migrasi sebagai masalah keamanan nasional. Yang mana, bergantinya narsasi para politisi ini akhirnya melahirkan aturan hukum yang sangat keras, seperti *Nationality and Borders Act 2022*.

Cristina Saenz Perez (2023) dalam ulasannya berjudul *The Securitization of Asylum* menjelaskan bahwa undang-undang ini adalah puncak dari upaya Inggris untuk membuang tanggung jawab internasionalnya.[61] Melalui skema pengiriman pencari suaka ke Rwanda, Inggris mencoba memindahkan beban kemanusiaan ke negara lain agar tidak mengganggu stabilitas di dalam negeri.[62] Dengan demikian, perlindungan terhadap pencari suaka tidak lagi dipandang terutama sebagai tanggung jawab kemanusiaan, melainkan sebagai beban yang berusaha dipindahkan ke luar batas negara.

Senada dengan itu, Rossella Pulvirenti 2025 dalam tulisannya *From Solidarity to Exclusion* pada tahun 2025 turut menyoroti bahwa Inggris kini mengubah pengertian "negara aman" hanya agar punya alasan legal untuk mengusir migran.[63] Menurut Pulvirenti, kebijakan Inggris pada periode 2022–2024 ini mencerminkan hilangnya rasa solidaritas internasional dalam dunia modern. Hukum yang seharusnya melindungi manusia, kini justru dimodifikasi menjadi alat untuk menolak dan menjauhkan para pencari perlindungan dari wilayah Inggris.[64] Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketika solidaritas internasional melemah, hukum dan kebijakan dapat berubah dari alat perlindungan menjadi mekanisme penolakan terhadap mereka yang paling membutuhkan keamanan.

**PEMBAHASAN**

**Dramatisasi Krisis: *Speech Act* dan Konstruksi Migran sebagai *Existential Threat***

[57] Mayblin, "Imagining asylum," 15.
[58] Mayblin, "Imagining asylum," 18.
[59] Vahid Ghafouri et al., "Framing Migration: A Computational Analysis of UK Parliamentary Discourse," *arXiv preprint* (2025): 1-3.
[60] Ghafouri et al., "Framing Migration," 5.
[61] Cristina Saenz Perez, "The Securitization of Asylum: A Review of UK Asylum Laws Post-Brexit," *International Journal of Refugee Law* (2023): 3-4
[62] Perez, "The Securitization of Asylum," 17.
[63] Rossella Pulvirenti, "From Solidarity to Exclusion: The 'Safe Country' Concept in UK Asylum Law and the Irony of Borders," *Laws* 14, no. 63 (2025): 1-2.
[64] Pulvirenti, "From Solidarity to Exclusion," 10-12.

Proses sekuritisasi migrasi di Inggris pada periode 2021–2024 secara fundamental diberlakukan oleh pemerintah Inggris sebagai *securitizing actor* lewat penggunaan tindakan tutur (*speech act*) atau bisa disebut sebagai "pelabelan" yang sangat intensif untku menarik isu migrasi dari ranah politik biasa ke sektor keamanan.[65] Melalui pernyataan resmi para pejabat tinggi, seperti Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, pemerintah tidak lagi memposisikan penyeberangan Selat Inggris sebagai persoalan administratif atau kegagalan sistem suaka, melainkan sebagai krisis kedaulatan yang mendesak.[66] Tindakan ini berfungsi untuk menciiptakan batas pemisah yang tegas antara prosedur hukum biasa dengan logika darurat, di mana isu migrasi diberi label "ancaman" guna membenarkan intervensi negara yang lebih luas dan koersif.[67] Upaya framing ini pada mulanya mengubah cara publik memandang migrasi, dari sekadar persoalan administratif dan kemanusiaan menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara, sehingga pemerintah Inggris memperoleh dukungan guna kebijakan restriktigf lainnya.

Dalam membangun narasi tersebut, aktor sekuritisasi secara sengaja mendramatisasi lonjakan jumlah penyeberangan perahu kecil dan menampilkannya berulang kali sebagai bukti bahwa migrasi telah berkembang menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan Inggris.[68] Pemanfaatan data angka penyeberangan yang meningkat tajam pada 2021 bertujuan untuk membentuk persepsi publik bahwa perbatasan Inggris sedang mengalami 'invasi' yang berada di luar kendali negara.[69] Dengan membingkai statistik tersebut secara militeristik, pemerintah berhasil mengubah fenomena perpindahan manusia menjadi sebuah narasi "darurat perbatasan" yang mengancam integritas wilayah Britania Raya.[70] Dramatisasi ini sangat dipentingkan untuk melegitimasi klaim mereka, bahwa sistem suaka Inggris telah 'rusak' dan memerlukan tindakan luar biasa yang melampaui kerangka hukum konvensional.

Konstruksi ancaman eksistensial ini semakin diperkuat melalui penggunaan jargon, terutama slogan *Stop the Boats*, yang berfungsi sebagai kata-kata andalan untuk menyederhanakan persoalan migrasi yang kompleks menjadi narasi keamanan yang tegas dan mudah dipahami oleh publik.[71] Slogan ini bukan sekadar alat kampanye, melainkan instrumen *speech act* sebagaimana dalam teori, yang mana dianggap mempan untuk mengalihkan perhatian publik dari akar penyebab migrasi menuju fokus tunggal pada metode kedatangan yang dianggap ilegal.[72] Melalui pengulangan slogan ini secara masif di media, pemerintah berhasil

[65] Vahid Ghafouri et al., "Framing Migration: A Computational Analysis of UK Parliamentary Discourse," *arXiv preprint*, (2025): 32.
[66] Donatella Bonansinga and Charlotte Forrest, "'Stop the Boats': Populist Contagion and Migration Policymaking in the UK," *Ethnic and Racial Studies* (Februari 2025): 28.
[67] Samson Maekele Tsegay, "A Scoping Review of UK Immigration and Asylum Laws: The Endless Cycle of 'Migration Fix'," *Genealogy* 10, no. 12 (2026): 22.
[68] Vahid Ghafouri et al., "Framing Migration," 34.
[69] Laura Planas Gifra, "Securitizing Migration in Times of Crisis: Private Actors and the Provision of (In)security," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 18.
[70] Donatella Bonansinga and Charlotte Forrest, "'Stop the Boats'," 30.
[71] Donatella Bonansinga and Charlotte Forrest, "'Stop the Boats'," 29.
[72] Sarah Singer, "Criminalising Asylum Beyond Prosecution: Exclusionary Law and Policy in the UK," *Laws* 15, no. 28 (2025): 25.

menetapkan bahwa setiap perahu yang melintasi Selat Inggris merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas domestik dan tatanan hukum nasional.[73] Tremasuk tindakan penghentian paksa perahu mencerminkan pergeseran prioritas keamanan di mana nyawa manusia seringkali ditempatkan di bawah target statistik kontrol perbatasan.[74]

Lebih lanjut, aktor sekuritisasi secara sistematis mengidentifikasi kedaulatan negara dan identitas nasional sebagai "objek referen" (*referent object*) yang sedang berada dalam risiko kehancuran jika arus migrasi tidak kunjung dihentikan.[75] Pasca-Brexit, kemampuan untuk "mengambil kembali kendali" (*take back control*) atas perbatasan telah digambarkansebagai patokan utama keberhasilan negara dalam mempertahankan kedaulatannya. [76] Oleh karena itu, kegagalan dalam mengendalikan penyeberangan perahu kecil imigran dicitrakan sebagai kegagalan yang dapat merusak tatanan sosial dan identitas Inggris sebagai negara kepulauan yang berdaulat. [77] Konstruksi ini turut memvalidasi narasi bahwa migran (khususnya non-reguler/jalur yang dianggap 'ilegal') adalah kelompok yang secara inheren mengancam, sehingga eksistensi negara hanya dapat dijamin melalui pengetatan perbatasan yang bersifat absolut.[78]

Sebagai esensi dari proses pembentukan wacana ini, seluruh rangkaian seperti *speech act* dan dramatisasi krisis tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah logika darurat (*emergency logic*) yang mampu menangguhkan perdebatan mengenai hak asasi manusia.[79] Ketika migrasi telah berhasil dikonstruksi sebagai ancaman ekistensial terhadap objek referen yang penting, maka segala bentuk tindakan luar biasa (*exceptional measures*) dianggap sebagai respons yang logis dan dibenarkan secara moral.[80] Kondisi darurat yang diciptakan melalui narasi ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih represif, di mana pengawasan terhadap perbatasan diposisikan lebih tinggi daripada kewajiban internasional dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi.[81] Dengan demikian, narasi darurat yang dibangun pemerintah Inggris menjadikannya benih kebijakan yang semakin keras terhadap migran seakan dipandang sebagai langkah yang wajar, bahkan dianggap perlu demi melindungi keamanan dan kedaulatan negara.

**Legitimasi Politik: Peran *Audience* dan *Referent Object* dalam Membangun Konsensus Keamanan**

Keberhasilan proses sekuritisasi migrasi di Inggris tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menggaungkan wacana

[73] Vahid Ghafouri et al., "Framing Migration," 35.
[74] Laura Planas Gifra, "Securitizing Migration," 20.
[75] Cristina Saenz Perez, "The Securitization of Asylum: A Review of UK Asylum Laws Post-Brexit," *International Journal of Refugee Law* (2023): 28.
[76] Arshia Dutta and Rikke Bjerg Jensen, "Security at the Border? The Lived Experiences of Refugees and Asylum Seekers in the UK," *arXiv preprint*, (2026): 33.
[77] Cristina Saenz Perez, "The Securitization of Asylum," 29.
[78] Samson Maekele Tsegay, "A Scoping Review," 25.
[79] Sarah Singer, "Criminalising Asylum," 26.
[80] Fransiska A. Susanto, "The UK–Rwanda Migration and Economic Development Partnership Based on International Refugee Law," *PJIH* 12, no. 1 (2025): 115.
[81] Vahid Ghafouri et al., "Framing Migration," 38.

ancaman, tetapi juga pada adanya penerimaan khalayak (*audience acceptance*) yang memberikan legitimasi politik atas tindakan luar biasa yang diambil. Dalam kerangka Mazhab Kopenhagen, sekuritisasi baru dianggap lengkap jika audiens—yang dalam konteks ini mencakup Parlemen Inggris dan publik pemilih yang terlibat—menerima klaim bahwa isu migrasi memang merupakan ancaman eksistensial yang memerlukan penanganan di luar prosedur biasa.[82] Narasi pasca-Brexit memainkan peran krusial dalam meyakinkan audiens di sini, yang mana janji untuk "mengambil kembali kendali" atas perbatasan telah menjadikan sebuah standar moral baru bagi masyarakat Inggris dalam menilai efektivitas pemerintah.[83] Persetujuan dari audiens ini menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bisa meresmikan bermacam regulasi yang secara drastis mengurangi hak-hak pemcari suaka tanpa harus menghadapi resistensi politik yang mampu membatalkan kebijakan tersebut.[84]

Dalam upaya mendapatkan kesepakatan keamanan tersebut, aktor sekuritisasi secara tajam mengidentifikasi dan mengomunikasikan objek referen yang diklaim sedang berada dalam risiko kehancuran. Objek referen utama dalam kasus ini bukanlah sekadar integritas fisik wilayah, melainkan integritas sistem hukum domestik dan stabilitas relasi sosial Inggris yang dicitrakan sedang tertekan oleh beban migrasi non-reguler.[85] Pemerintah mencoba membangun persepsi bahwa tanpa tindakan tegas, nilai-nilai keadilan bagi warga negara asli akan tergerus oleh kelompok yang dituduh "melompati antrean" (*queue jumpers*).[86] Dengan memposisikan stabilitas sistem suaka sebagai objek yang harus dilindungi, pemerintah berhasil membingkai kebijakan restriktif bukan sebagai bentuk kekejaman, melainkan sebagai upaya heroik untuk melindungi keberlangsungan hidup tatanan sosial Inggris itu sendiri.[87]

Sentimen nasionalisme ini menjadi penyebab penting yang memperkuat hubungan antara audiens dan objek referen, di mana kedaulatan perbatasan dipandang sebagai simbol harga diri bangsa.[88] Narasi krisis yang dibangun secara konsisten di media massa Inggris bertujuan untuk menciptakan perasaan ketidakamanan kolektif di tengah publik, yang pada gilirannya menharuskan negara untuk memprioritaskan keamanan nasional di atas kewajiban kemanusiaan global.[89] Konsensus ini terlihat jelas ketika perdbeatan di Parlemen Inggris sering kali dimenangkan oleh logika keamanan dengan alasan bahwa arus migrasi yang tak terkendali akan merusak "perjanjian sosial" antara negara dan warga negaranya.[90] Tanpa

[82] Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), 25.
[83] Cristina Saenz Perez, "The Securitization of Asylum: A Review of UK Asylum Laws Post-Brexit," *International Journal of Refugee Law* (2023): 2.
[84] Donatella Bonansinga and Charlotte Forrest, "'Stop the Boats': Populist Contagion and Migration Policymaking in the UK," *Ethnic and Racial Studies* (Februari 2025): 31.
[85] Arshia Dutta and Rikke Bjerg Jensen, "Security at the Border? The Lived Experiences of Refugees and Asylum Seekers in the UK," *arXiv preprint*, (2026): 34.
[86] Vahid Ghafouri et al., "Framing Migration: A Computational Analysis of UK Parliamentary Discourse," *arXiv preprint*, (2025): 36.
[87] Ian Paterson dan Georgios Karyotis, "'We are, by nature, a tolerant people': Securitisation and counter-securitisation in UK migration politics," *International Relations* 36, no. 1 (2022): 108.
[88] Perez, "The Securitization of Asylum," 5.
[89] Bonansinga and Forrest, "'Stop the Boats'," 32.
[90] Ghafouri et al., "Framing Migration," 37.

adanya dukungan yang kuat dari audiens yang telah terpengaruh oleh isu sentimen ini, kebijakan kontroversial seperti relokasi ke negara lain seperti Rwanda pada April 2022 akan sulit untuk dijustifikasi secara politik maupun hukum.[91] Dengan demikian, dukungan publik yang dibentuk melalui sentimen nasionalisme dan rasa tidak aman kolektif menjadi fondasi penting yang memungkinkan pemerintah Inggris memperoleh legitimasi untuk menerapkan kebijakan migrasi yang semakin keras dan kontroversial.

Lebih lanjut, legitimasi politik ini dicapai melalui proses penyederhanaan kompleksitas (*complexity simplification)* yang ditujukan kepada audiens untuk mengaburkan dimensi HAM yang seharusnya diperlukan para pengungsi.[92] Dengan mereduksi identitas individu pengungsi menjadi label 'ancaman bersama', audiens lebih mudah untuk menerima perlakuan diskriminatif yang dituangkan dalam kebijakan negara.[93] Objek referen yang berupa keteraturan hukum digunakan untuk memvalidasi tindakan yang secara teknis melanggar hukum internasional, karena audiens telah diyakinkan bahwa hukum domestik dan kedaulatan nasional memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan norma-norma global.[94] Pola ini menunjukkan bahwa sekuritisasi di Inggris bekerja dengan memanfaatkan bias identitas audiens untuk menciptakan ruang bagi negara agar dapat bertindak secara luar biasa tanpa kehilangan dukungan elektoral.[95]

Kemudian, pembentukan konsensus ini menciptakan sebuah lingkungan politik di mana keamanan nasional menjadi satu-satunya parameter kesuksesan kebijakan migrasi.[96] Objek referen yang telah tersekuritisasi—yaitu perbatasan yang tertutup dan kedaulatan yang absolut—menjadi indikator tunggal bagi audiens untuk menilai kinerja pemerintah.[97] Hal ini mengakibatkan hilangnya nuansa kemanusiaan dalam diskursus publik, karena audiens telah terbiasa memandang migran bukan sebagai manusia yang mencari perlindungan, melainkan sebagai variabel risiko yang harus diminimalisir demi stabilitas negara.[98] Dengan demikian, peran audiens dalam membangun konsensus keamanan ini menjadi jembatan yang menghubungkan antara wacana ancaman di tingkat elit dengan implementasi tindakan luar biasa di lapangan, yang pada akhirnya menormalisasi praktik-praktik eksklusi dalam sistem hukum Inggris.[99] Itu artinya, ketika publik mulai menerima migrasi semata-mata sebagai hanya persoalan keamanan, pemerintah Inggris justrusemakin leluasa menempatkan kedaulatan dan pengendalian perbatasan di atas

[91] Samson Maekele Tsegay, "A Scoping Review of UK Immigration and Asylum Laws: The Endless Cycle of 'Migration Fix'," *Genealogy* 10, no. 12 (2026): 26.
[92] Lucy Mayblin, "Imagining asylum, governing asylum seekers: Complexity reduction and policy making in the UK Home Office," *Migration Studies* 5, no. 1 (2017): 4.
[93] Sarah Singer, "Criminalising Asylum Beyond Prosecution: Exclusionary Law and Policy in the UK," *Laws* 15, no. 28 (2025): 27.
[94] Rossella Pulvirenti, "From Solidarity to Exclusion: The 'Safe Country' Concept in UK Asylum Law and the Irony of Borders," *Laws* 14, no. 63 (2025): 6.
[95] Paterson dan Karyotis, "'We are, by nature, a tolerant people'," 110.
[96] Planas Gifra, "Securitizing Migration in Times of Crisis: Private Actors and the Provision of (In)security," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 21.
[97] Perez, "The Securitization of Asylum," 18.
[98] Dutta and Jensen, "Security at the Border?," 35.
[99] Tsegay, "A Scoping Review," 27.

pertimbangan kemanusiaan, sehingga kebijakan-kebijakan yang keras terhadap para migran pun perlahan dianggap sebagai langkah yang wajar.

**Institusionalisasi Keamanan: *Exceptional Measures* dan Normalisasi Krisis (2021–2024)**

Sebagaimana yang telah diutarakan sedikit sebelumnya, institusionalisasi keamanan di Inggris bermula pada tahun 2021, ketika pemerintah menilai bahwa mekanisme politik dan kebijakan yang berjalan selama ini tidak lagi mampu menahan meningkatnya arus penyeberangan migran melalui Selat Inggris. Pada fase ini, pemerintah mulai merumuskan tindakan luar biasa (*exceptional measures*) sebagai jawaban atas "darurat" yang dicanangkan melalui narasi atau ujaran (*speech act*) sebelumnya.[100] Secara kronologis, tahun 2021 memang menjadi titik balik di mana logika keamanan mulai mengesampingkan sistem administrasi, yang kemudian dinyatakan melalui pengenalan draf kebijakan restriktif yang nantinya menjadi landasan *Nationality and Borders Act* di tahun 2022.[101] Langkah ini mencerminkan esensi sekuritisasi, di mana negara merasa berhak menangguhkan standar kemanusiaan internasional demi melindungi perbatasan yang dicitrakan sedang dalam kondisi "terinvasi".[102]

Memasuki tahun 2022 setelah konsep tadi dicanangkan pada 2021, tahun ini adalah titik didihnya yang mana sekuritisasi tersebut diwujudkan secara formal melalui pengesahan *Nationality and Borders Act 2022*, sebuah instrumen hukum yang memfasilitasi penangguhan hak-hak pencari suaka berdasarkan cara kedatangan mereka.[103] Secara teoretis, undang-undang ini adalah bentuk nyata dari penangguhan aturan normal, di mana Inggris secara sepihak menciptakan sistem suaka dua tingkat yang mendiskriminasi pengungsi, yang mana ini sebuah tindakan yang secara sadar malah menabrak prinsip *non-refoulement* (dilarang mengusir orang ke tempat yang bisa membunuh mereka) dalam Konvensi Pengungsi 1951.[104] Puncak dari penerapan kebijakan luar biasa pada tahun 2022 adalah penandatangannan kemitraan dengan Rwanda, yaitu strategi eksternalisasi perbatasan yang dirancang untuk memindahkan proses penanganan pencari suaka dan sebagian tanggung jawab negara kepada negara ketiga.[105] Melalui langkah kerjasama dengan Rwanda ini, aktor sekuritisasi menegaskan bahwa keberadaan fisik migran adalah risiko keamanan yang harus segera disingkirkan dari wilayah kedaulatan nasional.[106] Dengan demikian, periode ini menjadi titik saat narasi ancaman terhadap migrasi mulai diwujudkan ke dalam hukum dan kebijakan konkret, sehingga pembatasan terhadap hak

[100] Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), 24.
[101] Vahid Ghafouri et al., "Framing Migration: A Computational Analysis of UK Parliamentary Discourse," *arXiv preprint*, (2025): 34.
[102] Samson Maekele Tsegay, "A Scoping Review of UK Immigration and Asylum Laws: The Endless Cycle of 'Migration Fix'," *Genealogy* 10, no. 12 (2026): 22.
[103] Cristina Saenz Perez, "The Securitization of Asylum: A Review of UK Asylum Laws Post-Brexit," *International Journal of Refugee Law* (2023): 4.
[104] Rossella Pulvirenti, "From Solidarity to Exclusion: The 'Safe Country' Concept in UK Asylum Law and the Irony of Borders," *Laws* 14, no. 63 (2025): 2.
[105] Fransiska A. Susanto, "The UK–Rwanda Migration and Economic Development Partnership Based on International Refugee Law," *PJIH* 12, no. 1 (2025): 116.
[106] Perez, "The Securitization of Asylum," 6.

pencari suaka boleh mendapat legitimasi resmi atas nama perlindungan perbatasan dan kedaulatan negara.

Eskalasi tindakan luar biasa semakin menguat di tahun 2023 dengan diperkenalkannya *Illegal Migration Act 2023*, yang memformalkan logika darurat ke dalam kewajiban hukum untuk mengusir setiap pendatang non-reguler.[107] Pada periode ini, pemerintah Inggris tidak lagi berhenti pada tataran wacana, tetapi mulai membangun sistem hukum dan birokrasi yang secara sistematis membatasi, bahkan menutup bagi akses klaim suaka para migran yang datang dengan perahu kecil.[108] Secara teoretis, ini adalah tahap di mana sekuritisasi telah berhasil mendominasi audiens di tingkat parlemen, sehingga kebijakan yang membatasi otoritas pengadilan pun dapat diterima demi terrealisasikannya efektivitas kontrol perbatasan.[109] Tahun 2023 juga ditandai dengan mulai digunakannya tongkang Bibby Stockholm sebagai fasilitas penampungan, yang berfungsi sebagai sarana pengendalian fisik untuk menciptakan efek jera melalui penempatan migran di ruang yang terisolasi dan sangat terbatas.[110]

Tahun 2024 menjadi puncak dari benturan antara logika keamanan dan otoritas hukum melalui pengesahan *Safety of Rwanda Act 2024*.[111] Tindakan ini merupakan manifestasi paling radikal dari *exceptional measures*, di mana pemerintah menggunakan legislasi untuk mendeklarasikan sebuah 'fakta' politis (bahwa Rwanda adalah negara aman) guna membatasi kewenangan yudisial Mahkamah Agung Inggris.[112] Dalam perspektif sekuritisasi, langkah tahun 2024 ini menunjukkan bahwa demi melindungi objek referen berupa kedaulatan perbatasan, negara bersedia melakukan intervensi terhadap independesi lembaga peradilan.[113] Hal ini telah membuktikan bahwa status darurat telah terinstitusionalisasi secara mendalam, di mana hukum tidak lagi menjadi pelindung individu, melainkan alat teknokratis untuk mencapai target keamanan negara.

Pasca-transisi pemerintahan pada Juli 2024, meskipun terdapat perubahan kepemimpinan politik, struktur sekuritisasi yang telah dibangun tetap bertahan melalui pembentukan *Border Security Command* (BSC).[114] Alih-alih melakukan desekuritisasi, pemerintah baru justru melakukan normalisasi krisis dengan mengganti retorika populis menjadi pendekatan administratif-intelijen yang lebih teknokratis namun tetap dalam paradigma keamanan perbatasan.[115] BSC mencerminkan bahwa "logika keamanan" telah mengakar kuat pada sistem di dalam birokrasi Inggris, di mana migrasi tetap dikategorikan sebagai ancaman kriminalitas serius yang memerlukan

[107] Tsegay, "A Scoping Review," 25.
[108] Sarah Singer, "Criminalising Asylum Beyond Prosecution: Exclusionary Law and Policy in the UK," *Laws* 15, no. 28 (2025): 24.
[109] Ghafouri et al., "Framing Migration," 38.
[110] Arshia Dutta and Rikke Bjerg Jensen, "Security at the Border? The Lived Experiences of Refugees and Asylum Seekers in the UK," *arXiv preprint*, (2026): 36.
[111] Pulvirenti, "From Solidarity to Exclusion," 9.
[112] Susanto, "The UK–Rwanda Migration," 119.
[113] Tsegay, "A Scoping Review," 26.
[114] Donatella Bonansinga and Charlotte Forrest, "'Stop the Boats': Populist Contagion and Migration Policymaking in the UK," *Ethnic and Racial Studies* (Februari 2025): 33.
[115] Ghafouri et al., "Framing Migration," 40.

penegakan hukum luar biasa.[116] Transisi tahun 2024 ini menjadi bukti bahwa sekali sebuah isu berhasil disekuritisasi secara total, ia akan sangat sulit dikembalikan ke ranah politik normal meskipun aktor politiknya berganti.[117]

Secara kronologis, dari 2021 hingga 2024, Inggris telah berhasil membangun sebuah ekosistem keamanan yang komprehensif, mulai dari diskursus invasi hingga penciptaan penjara terapung dan hukum pengusiran otomatis.[118] Setiap kebijakan, dari UU 2022 hingga UU 2024, merupakan rantai tindakan yang secara teoretis saling mengunci untuk melegitimasi penangguhan hak asasi manusia demi stabilitas domestik.[119] Konsistensi tindakan ini menunjukkan bahwa objek referen berupa kedaulatan nasional pasca-Brexit telah diletakkan di atas segala norma internasional lainnya.[120] Kegagalan sistem hukum domestik untuk membendung kebijakan-kebijakan ini menjadi indikator kuat bahwa audiens (parlemen dan publik) telah sepenuhnya menyerap logika keamanan yang ditawarkan oleh aktor sekuritisasi.[121]

Sebagai kesimpulan analisis kronologi, institusionalisasi yang terjadi sepanjang periode 2021–2024 telah mengubah wajah hukum asilum Inggris dari sistem perlindungan menjadi sistem eksklusi yang permanen.[122] Penggunaan instrumen hukum luar biasa, kontrol fisik yang represif, hingga pengabaian otoritas hukum merupakan bukti tak terbantahkan bahwa sekuritisasi migrasi di Inggris bukan sekadar respons terhadap krisis, melainkan upaya sistematis untuk memulihkan kontrol kedaulatan dengan cara-cara yang melampaui batas kewajaran hukum di negara dengan demokrasi liberal.[123] Dengan demikian, Inggris telah menciptakan standar baru dalam politik perbatasan global, di mana logika keamanan nasional selalu dimenangkan atas komitmen kemanusiaan internasional (sekalipun itu bertentangan) melalui mekanisme sekuritisasi yang sangat terukur dan terinstitusi.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sekuritisasi migrasi di Inggris pada periode 2021–2024 merupakan proses yang secara bertahap mengubah migrasi dari isu kemanusiaan menjadi persoalan keamanan nasional. Dengan menggunakan teori sekuritisasi dari Mazhab Kopenhagen, peneitian ini menemukan bahwa pemerintah Inggris berperan sebagai aktor utama yang membangun narasi bahwa migrasi non-reguler, terutama melalui penyeberangan perahu kecil, merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara, identitas nasional, dan stabilitas sistem suaka. Narasi seperti *Stop*

[116] Bonansinga and Forrest, "'Stop the Boats'," 35.
[117] Tsegay, "A Scoping Review," 28.
[118] Planas Gifra, "Securitizing Migration in Times of Crisis: Private Actors and the Provision of (In)security," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 23.
[119] Perez, "The Securitization of Asylum," 18.
[120] Dutta and Jensen, "Security at the Border?," 38.
[121] Ghafouri et al., "Framing Migration," 42.
[122] Tsegay, "A Scoping Review," 30.
[123] Pulvirenti, "From Solidarity to Exclusion," 12.

*the Boats* dan istilah "krisis perahu kecil" digunakan untuk membentuk persepsi publik bahwa migrasi bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman yang memerlukan tindakan tegas di luar mekanisme politik biasa.

Penelitian ini juga menemukan bahwa narasi ancaman tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan dan perangkat hukum yang semakin restriktif. Nationality and Borders Act 2022, Illegal Migration Act 2023, hingga Safety of Rwanda Act 2024 menunjukkan bagaimana pemerintah Inggris secara bertahap membangun sistem yang menempatkan pengendalian perbatasan di atas perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan relokasi pencari suaka ke Rwanda dan penggunaan tongkang *Bibby Stockholm* memperlihatkan bahwa sekuritisasi tidak berhenti pada ranah sekedar wacana, tetapi telah menjadi bagian dari struktur hukum, birokrasi, dan praktik administratif negara. Dengan demikian, sistem suaka yang pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan justru bergeser menjadi mekanisme untuk membatasi dan mencegah kedatangan migran.

Terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian pemerintahan pada Juli 2024 tidak menghapus logika sekuritisasi, tetapi hanya mengubah bentukya menjadi lebih administratif dan teknokratis melalui pembentukan Border Security Command. Hal ini menandakan bahwa sekuritisasi migrasi telah terlembaga secara mendalam dalam kebijakan negara dan tidak mudah dikembalikan ke ranah politik normal. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa negara demokrasi liberal pun dapat menggunakan narasi keamanan untuk menempatkan kedaulatan nasional di atas komitmen kemanusiaan dan kewajiban hukum internasional. Dengan demikian, kasus Inggris menunjukkan bahwa sekuritisasi migrasi telah berkembang menjadi strategi jangka panjang untuk mempertahankan kontrol negara melalui normalisasi kebijakan eksklusif terhadap para pencari perlindungan. Secara garis besar, penelitian ini masih berfokus pada kebijakan dan narasi pemerintah Inggris periode 2021–2024. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya mungkin dapat memperluas kajian dengan meninjau negara-negara Eropa lain untuk melihat perbedaan pola sekuritisasi migrasi dalam konteks politik domestik yang berbeda.

**Daftar Pustaka**

Bello, Valeria. "The Spiralling of the Securitisation of Migration in the EU." *Journal of Ethnic and Migration Studies* (2020).

Bonansinga, Donatella, and Charlotte Forrest. "'Stop the Boats': Populist Contagion and Migration Policymaking in the UK." *Ethnic and Racial Studies* (February 2025).

Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998.

Dutta, Arshia, and Rikke Bjerg Jensen. "Security at the Border? The Lived Experiences of Refugees and Asylum Seekers in the UK." *arXiv preprint* (2026).

Ghafouri, Vahid, et al. "Framing Migration: A Computational Analysis of UK Parliamentary Discourse." *arXiv preprint* (2025).

Gower, Melanie. "Nationality and Borders Bill." *House of Commons Library Briefing Paper* No. 9275 (2021).

Gray, Harriet, and Anja K. Franck. "Refugees as/at Risk: The Gendered and Racialized Underpinnings of Securitization in British Media Narratives." *Security Dialogue* 50, no. 3 (2019): 275–291.

Griffiths, Clare, and Julie Trebilcock. "Continued and Intensified Hostility: The Problematisation of Immigration in the UK Government's 2021 New Plan for Immigration." *Critical Social Policy* (2021).

Home Office. "Irregular Migration to the UK, Year Ending December 2021." *Official Statistics*. February 2022.

Huysmans, Jef. "The European Union and the Securitization of Migration." *Journal of Common Market Studies* 38, no. 5 (2000): 751–777.

Mayblin, Lucy. "Imagining Asylum, Governing Asylum Seekers: Complexity Reduction and Policy Making in the UK Home Office." *Migration Studies* 5, no. 1 (2017): 1–18.

Ogba, Miracle Oluchi. "Migration Detention Centres and the Impact the Bibby Stockholm Barge Has on Asylum-Seekers in the United Kingdom: A Critical Appraisal." *Abia Law Journal* (2023).

Paterson, Ian, and Georgios Karyotis. "'We Are, by Nature, a Tolerant People': Securitisation and Counter-Securitisation in UK Migration Politics." *International Relations* 36, no. 1 (2022): 103–124.

Perez, Cristina Saenz. "The Securitization of Asylum: A Review of UK Asylum Laws Post- Brexit." *International Journal of Refugee Law* (2023).

Planas Grifa, Laura. "Securitizing Migration in Times of Crisis: Private Actors and the Provision of (In)security." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2296601.

Pulvirenti, Rossella. "From Solidarity to Exclusion: The 'Safe Country' Concept in UK Asylum Law and the Irony of Borders." *Laws* 14, no. 63 (2025).

Pursglove, Tom MP. "Oral Evidence: Channel Crossings, Migration and Asylum-Seeking Routes through the EU." *Home Affairs Select Committee*. 4 January 2022.

Singer, Sarah. "Criminalising Asylum Beyond Prosecution: Exclusionary Law and Policy in the UK." *Laws* 15, no. 28 (2025).

Susanto, Fransiska A. "The UK–Rwanda Migration and Economic Development Partnership Based on International Refugee Law." *Padjadjaran Journal of International Law* 12, no. 1 (2025): 113–127.

Tsegay, Samson Maekele. "A Scoping Review of UK Immigration and Asylum Laws: The Endless Cycle of 'Migration Fix'." *Genealogy* 10, no. 12 (2026).

United Kingdom. *Illegal Migration Act 2023*. c. 37.

United Kingdom. *Nationality and Borders Act 2022*. c. 36.

United Kingdom. *Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Act 2024*. c. 8.